

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah Lingkungan Hidup, terutama pencemaran dan perusakan lingkungan senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan, baik ditingkat internasional, nasional, regional maupun lokal. Persoalan lingkungan ini tentu berkaitan dengan aspek geofisik, ekosistem, social budaya dan ekonomi sehingga diperlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui perencanaan program dan atau kegiatan yang komprehensif, kontinyu dan terintegrasi.

Program dan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan dan dilaksanakan tentu diarahkan kepada isu-isu strategis pembangunan papua sesuai visi misi Pemerintahan Provinsi Papua yang telah berkomitmen menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta keberadaan sumber daya alam pada kondisi yang aman, lestari dan berkelanjutan.

Untuk itu salah satu hal penting dalam penentuan prioritas program dan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua adalah kecepatan dan ketepatan merespon isu-isu strategis dimaksud yang kemudian dijabarkan dalam pembagian peran (role sharing) ke semua pemangku kepentingan.

Di Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup telah merencanakan program dan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap yang dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun berjalan, sesuai anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua program dan atau kegiatan di tahun 2016, maka disusun Laporan Tahunan sebagai dokumen evaluasi dan dokumen perencanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun berikutnya sekaligus menjadi informasi kepada publik sebagaimana amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan BPLH Provinsi Papua Tahun 2016 bertujuan:

- Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Tahun 2016;
- Memberikan gambaran proses pelaksanaan program/kegiatan
- Menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016;

C. MANFAAT PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan BPLH Provinsi Papua tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
- Sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Papua;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua (DPA-SKPD) nomor : 1.08.01.00.00.5.1 tanggal 12 Januari 2016.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Tahunan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Daftar Isi
- c. Bab I. Pendahuluan
- d. Bab II. Kondisi Umum BPLH Provinsi Papua
- e. Bab III. Program Kerja
- f. Bab IV. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- g. Bab V Keuangan
- h. Bab VI Masalah Dan Solusi
- i. Bab VII Program Kerja Tahun 2017

F. VISI

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Papua saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Papua maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua Tahun 2014-2018 adalah :

“BPLH Provinsi Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”.

G. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan;
2. Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance;
3. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola lingkungan hidup;
5. Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung);
7. Mengembangkan system manajemen dan informasi lingkungan hidup;
8. Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca;

H. TUJUAN DAN SASARAN

1	Misi kesatu	:	Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDALH guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan
	Tujuan Misi	:	Merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Sasaran strategis	:	Tersedianya kebijakan pengelolaan SDA dan LH di Papua
2	Misi kedua	:	Membangun perencanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup antar pemangku kepentingan
	Tujuan isi	:	Mengkordinasikan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan para pihak
	Sasaran Strategis	:	Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Alam dan LH yang didukung oleh para pihak.
3	Misi ketiga	:	Menjamin kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan proporsional
	Tujuan Misi	:	Melaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kuantitas dan kualitas potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis	:	Terkendalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

4	Misi keempat	: Mewujudkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan
	Tujuan Misi	: Memanfaatkan SDA dan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kapasitas fiskal Papua secara berkelanjutan
	Sasaran Strategis	: Tercapainya taraf hidup masyarakat yang sejahtera dan meningkatnya kapasitas fiskal
5	Misi kelima	: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Tujuan Misi	: Melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan LH
	Sasaran Strategis	: Tersedianya lembaga yang profesional dalam pengelolaan sumber daya alam dan LH
6	Misi keenam	: Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Tujuan Misi	: Memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan SDA dan LH
	Sasaran Strategi	: Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH berbasis masyarakat adat Papua.
7	Misi ketujuh	: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kapasitas (daya tampung dan daya dukung) dan kualitas lingkungan hidup.
	Tujuan Misi	: Melaksanakan upaya pengendalian dan pengawasan lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis	: Terwujudnya kapasitas dan kualitas LH yang berkelanjutan
8	Misi kedelapan	: Melaksanakan penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

	Tujuan Misi	: Meningkatkan kesadaran para pihak terhadap penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Sasaran Strategis	: Terciptanya dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
9	Misi Kesembilan	: Mengembangkan sistem manajemen dan informasi aset sumber daya alam dan lingkungan
	Tujuan Misi	: Melaksanakan kerjasama dengan para pihak dalam menghimpun data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
	Sasaran Strategis	: Tersedianya data base SDA dan LH yang didukung dengan Teknologi dan SDM yang profesional.

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang.

J. KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Papua sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan jasa-jasa lingkungannya, secara efisien, efektif, optimal dan akuntabel dalam mendukung perekonomian dan kehidupan rakyat Papua yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip sustainable management
2. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat Papua.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mantap yang disertai dengan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan instrumen pendukung lainnya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan lingkungan hidup, yang

berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

4. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan peran aktif Papua dalam perlindungan lingkungan global.
7. Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim.

Tujuh kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut selanjutnya merupakan prioritas pula dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2016 Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua memperoleh alokasi dana dari APBD Provinsi Papua sebesar Rp.32.623.543.000,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 10.576.675.000,-
- b. Belanja Langsung Rp. 22.101.593.000,-

Belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai seperti gaji dan tunjangan pegawai sedangkan **belanja langsung** digunakan untuk membiayai 10 Program terdiri dari 40 (Empat puluh) kegiatan pembangunan yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Sampai bulan Desember 2016, dana belanja tidak langsung terrealisasi sebesar Rp. 9.710.476.209,- (Sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan rupiah) atau 91,81% dan belanja langsung realisasi keuangannya sebesar Rp.20.217.952.627,- (Dua puluh milyar seratus satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu *rupiah*) atau 91,48% untuk membiayai 40 Kegiatan.

Untuk kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada matrik/tabel berikut: (F4-TP2K)

TP2K

BAB III

HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Pada tahun anggaran 2016. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Output Kegiatan

-

Anggaran kegiatan sebesar Rp.-, Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 0% dan realisasi keuangan 0% dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. - . Dengan bobot 0%.

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya :

- 1) Alat Pendingin Ruangan (AC Sharp 1 PK) : 4 Unit

Anggaran kegiatan sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah). Dengan bobot 0,90%.

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya :

- | | | |
|-------------------------|------|-------|
| 1) Mesin Genset 100 KVA | : 1 | Unit |
| 2) Instalasi Genset | : 1 | Paket |
| 3) Alat-alat Studio | : 40 | Jenis |

Anggaran kegiatan sebesar Rp.917.250.000,- (Sembilan ratus tujuh belas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,74% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 914.900.000,-(Sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah). Dengan bobot 34,31%.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan salah satu cara untuk menjaga keawetan kendaraan agar proses operasional kantor tetap lancar.

Output Kegiatan.

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, yang terdiri dari :

- Mobil : 10 (sepuluh) Unit
- Motor : 20 (Lima belas) Unit

Outcome Kegiatan.

Lancarnya operasional kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 894.900.000,-(Delapan ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 85,52% dan realisasi keuangan 99,74% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 914.900.000,-(Sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah). Dengan bobot 33,48%.

5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor merupakan salah satu cara untuk menjaga keawetan perlengkapan gedung kantor agar proses operasional kantor tetap lancar.

Output Kegiatan.

- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, terdiri dari:
 - 1) Pengisian Freon AC 45 unit
 - 2) Pemeliharaan Komputer 40 unit
 - 3) Pemeliharaan Jaringan WiFi 1 paket

Outcome Kegiatan.

- Lancarnya pelayanan administrasi kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh tujuh Juta Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,94 % sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 246.845.500,- (Dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan bobot 9,24%.

6. Pembangunan Rumah Satpam Laboratorium Lingkungan Hidup

Pembangunan Rumah Satpam Laboratorium merupakan salah satu cara untuk menjaga keamanan gedung laboratorium BPLH Provinsi Papua.

Output Kegiatan.

Terbangunnya Rumah Satpam Laboratorium BPLH Provinsi Papua

Outcome Kegiatan.

Terjaganya Laboratorium BPLH Provinsi Papua

Anggaran kegiatan sebesar Rp.374.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100 % dan realisasi keuangan 99.71% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp.373.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Dengan bobot 14,01%.

7. Pembangunan Rumah Genset Laboratorium Lingkungan Hidup

Pembangunan Rumah Genset Laboratorium merupakan salah satu cara untuk menjaga kestabilan listrik dalam gedung laboratorium BPLH Provinsi Papua.

Output Kegiatan.

Terbangunnya rumah genset laboratorium BPLH Provinsi Papua

Outcome Kegiatan.

Stabilnya listrik di Laboratorium BPLH Provinsi Papua

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 215.400.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 215.400.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Dengan bobot 8,06%.

II. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

Satu item dalam penilaian kinerja adalah kedisiplinan dalam berpakaian dinas.

Output Kegiatan.

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi PNS Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang terdiri dari :

- Baju Tradisional Batik Papua/Rok/Celana : 79 Stell
- Baju Putih dan Rok/Celana untuk eselon II dan III : 7 Stell
- Baju Putih dan Rok/Celana untuk eselon IV : 14 Stell
- Pengadaan Noken dan Topi kheki : 79 Stell
- Pakaian Olahraga : 101 Stell

Outcome Kegiatan

Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian dinas.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.221.500.000,-(dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 98,73% dan realisasi keuangan 98,51% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 218.200.000,-(dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Dengan bobot 1,00%.

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penting sehingga diperlukan pemahaman yang cukup memadai tentang kepegawaian, keuangan dan pengadaan barang/jasa, Kursus AMDAL dan Analisis Laboratorium.

Output Kegiatan.

Terlaksananya kursus/bimtek :

- PIM 3 : 1 orang
- PIM 4 : 1 orang
- Prajabatan Gol III : 1 orang
- Prajabatan Gol II : 1 orang
- Bimtek : 18 orang

Outcome Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan aparatur sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.459.000.000,- (Empat ratus lima puluh Sembilan Juta rupiah) Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 95% dan realisasi keuangan 98,69% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 439.167.000 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Dengan bobot 2,08 %.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua

Dalam perkembangan sejarah Kehidupan manusia, kuantitas dan kualitas air yang memenuhi standar kehidupan manusia merupakan faktor penting yang menentukan kualitas kesehatan hidup manusia. Kuantitas dan kualitas air berhubungan dengan adanya bahan – bahan lain terutama senyawa – senyawa kimia dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik, juga adanya mikroorganisme yang memegang peranan penting dalam menentukan komposisi kimia air. Di alam air berada dalam bentuk air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdapat di dalam danau, sungai dan sumber – sumber air lainnya, sedangkan air tanah terdapat di dalam tanah.

Hingga saat ini, pemanfaatan air permukaan belum maksimal sebagai air baku air minum, air permukaan berupa sungai masih digunakan sebagai sarana pembuangan sampah domestik bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan/bantaran sungai. Disamping itu beberapa sungai yang terdapat di Provinsi Papua secara alami memiliki kondisi fisik yang keruh akibat banyaknya partikel tersuspensi yang terdapat dalam badan air tersebut. Mengingat pentingnya ketersediaan air baku air minum untuk masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Pemantauan Kualitas Air yang meliputi beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Paniai. Pemantauan kualitas air yang dilakukan diharapkan dapat menyediakan informasi berupa data kualitas air pada lima sungai yang menjadi objek pengambilan contoh air dan data tersebut dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dalam penetapan pemanfaatan air baku air minum.

Sumber utama pencemaran pada sungai di Papua berasal dari aktifitas penduduk seperti limbah industri, pendulangan emas secara tradisional, bengkel, rumah makan dan sampah domestik rumah tangga yang terus meningkat setiap tahun.

Output Kegiatan

Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua menargetkan 5 sungai yang dipantau tapi realisasi sungai yg terpantau ada 13 sungai yg berada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Lokasi Pemantauan Kualitas Air Sungai adalah sebagai berikut :

a. Kab. Biak Numfor - Sungai Wafor - Kali Ruar	b. Kab. Merauke - Rawa Biru - Sungai Maro
c. Kab. Keerom - Sungai Tami	d. Kab. Jayapura - Sungai Damsari - Kali Biru
e. Kab. Jayawijaya - Sungai Baliem - Kali Napua	f. Kota. Jayapura - Kali Kamwolker - Kali Ajend
g. Kab. Mimika - Sungai Selamat Datang - Sungai Jayanti	

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara fisik beberapa sumber air yang dipantau seperti Hilir Sungai Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Sungai Selamat Datang, Rawa Biru, dan Hilir Sungai Maro, secara fisik tercemar oleh partikel tersuspensi, pencemaran yang terjadi masih bersifat alami.
2. Hilir sungai Maro memiliki nilai TSS yang sangat tinggi yaitu 285 Mg/L dari 50 Mg/L yang disyaratkan, hal ini dapat disebabkan titik tersebut berada di muara sehingga Natrium Klorida (NaCl), garam-garam magnesium (magnesium sulfat/MgSO₄) akan menyebabkan TDS menjadi tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada logam berat terlarut seperti merkuri, timbal, cadmium, arsenic, nikel dan lainnya yang berasal dari buangan/limbah.
3. Hasil analisis Kimia anorganik bukan logam seperti BOD pada 14 titik pantau sungai dan rawa di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom telah tercemar oleh limbah organik.

4. Kimia anorganik logam, khusus pencemaran yang diakibatkan oleh parameter logam seperti, Cd, Cu, Fe, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, hal ini disebabkan penyebaran material logam secara alami terdapat di Papua, tetapi tidak menutup kemungkinan tingginya kandungan parameter logam di badan air dapat berasal dari aktifitas manusia, seperti industry, pertanian, buangan rumah sakit, limbah domestik dan lainnya.
5. Biologi, hasil analisis laboratorium terhadap parameter Fecal Coliform dan Total Coliform pada 14 titik pantau menunjukkan tidak terjadi pencemaran oleh bakteri Fecal Coliform dan Bakteri Total Coliform .

Outcome Kegiatan

Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk mendapatkan data base dan trend kualitas air sungai dalam rangka pengelolaan kualitas air.

Pengambilan contoh air selain diambil pada sungai, contoh air juga diambil pada beberapa sumur yang dijadikan sebagai air baku air minum bagi masyarakat. Berikut informasi titik yang dijadikan objek pengambilan contoh uji.

Titik Sampling di Kabupaten Jayawijaya

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Sungai Napua	-
2.	Sungai Baliem	-

Titik Sampling di Kabupaten Jayapura

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Kali Biru	LS. 03 ⁰ 24' 23,6" BT. 135 ⁰ 31' 19,1"
2.	Sungai Damsari	LS. 03 ⁰ 22' 06,6" BT. 135 ⁰ 29' 28,2"

Titik Sampling di Kabupaten Mimika

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Sungai Selamat Datang	LS. 04 ⁰ 31' 23,0" BT. 136 ⁰ 51' 25,5"
2.	Sungai Jayanti	LS. 04 ⁰ 27' 24,6" BT. 136 ⁰ 51' 29,8"

Titik Sampling di Kabupaten Biak Numfor

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Kali Ruar	LS. 08 ⁰ 31' 25,6" BT. 140 ⁰ 24' 50,7"
2.	Sungai Wafor	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"

Titik Sampling di Kabupaten Merauke

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Rawa Biru	LS. 08 ⁰ 40' 49,4" BT. 140 ⁰ 51' 21,3"
2.	Hilir Sungai Maro	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"

Titik Sampling di Kabupaten Keerom

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Hulu Sungai Tami	LS. 08 ⁰ 40' 49,4" BT. 140 ⁰ 51' 21,3"
2.	Hilir Sungai Tami	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"

Titik Sampling di Kota Jayapura

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Sungai Ajend	LS. 08 ⁰ 40' 49,4" BT. 140 ⁰ 51' 21,3"
2.	Kali Kamwolker	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"

Prosedur pengambilan sampel yang dilakukan pada 14 titik pantau tersebut menggunakan metode Grab Sample (sesaat). Parameter yang di uji adalah parameter acuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan Klasifikasi Mutu Air Kelas I yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pemantauan Tahap I

Hasil pemantauan kualitas air di 14 titik pantau yang tersebar pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Terjadinya pencemaran air pada beberapa titik pantau ada yang disebabkan karena keadaan alami dari fisik air yang terlihat keruh seperti di Hulu Sungai Tami Kabupaten Keerom, dimana nilai parameter Total Suspended Solid (TSS) atau partikel yang tersuspensi dalam badan air mencapai 294 Mg/L dari yang seharusnya 50 Mg/L. Komponen pencemaran air juga dapat berasal dari aktifitas manusia seperti limbah domestic, pertanian dan industry. Contoh pencemar yang diakibatkan oleh aktifitas manusia adalah Fenol. Hasil analisis laboratorium terhadap parameter tersebut menunjukkan 10 titik pantau berada diatas baku mutu yaitu antara 13 µg/L di Hulu S. Tami di Keerom dan tertinggi 36 µg/L di Sungai Baliem Jayawijaya. Parameter logam terlarut seperti tembaga, hasil analisis menunjukkan 11 titik memiliki nilai konsentrasi berada diatas baku mutu yaitu antara 0.024 Mg/L di Kali Kamwolker Jayapura s/d 0.334 Mg/L di Sungai Napua Jayawijaya. nilai tertinggi terdapat di Sungai Baliem di Kabupaten Jayawijaya 0.094 Mg/L dari 0.03 Mg/L dan untuk parameter Mikrobiologi Bakteri Coli Tinja dan Coliform pada seluruh titik pantau masih berada di bawah baku mutu.

Hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada table berikut ini :

Data Hasil Analisis Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Jayawijaya

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Napua	25.3	-	14.0	8.52	-	70.0	-	-	-	<0.01	4.10	0.026	0.54	-	0.047
2.	Sungai Baliem	26.4	-	20.0	8.03	-	50.0	-	-	-	0.04	3.10	0.020	0.81	-	0.043

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	Minyak/ Lemak	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0,006	0,003	-	-	0,025	0,334	0,047	4,84	121,0	31,0	0,06	-	-
2.	-	-	0,008	0,004	-	-	0,026	0,349	0,047	13,4	334,0	36,0	0,08	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Provinsi Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Mimika

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Selamat Datang	-	-	23.0	-	-	10.0	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
2.	Sungai Jayanti	-	-	12.0	-	-	5.0	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034	-	-	-	-	-
2.	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.027	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Merauke**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Rawa Biru	-	-	16.0	-	-	40.0	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-
2.	Hulu S. Maro	-	-	23.0	-	-	25.0	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.005	0.037	-	0.000	0.019	0.064	0.038	0.26	315.0	-	-	-	-
2.	-	-	0.002	0.019	-	0.000	0.011	0.067	0.063	0.69	540.0	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Biak Numfor**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kali Ruar	27.0	-	24.0	7.76	-	15.0	7.50	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
2.	Sungai Wafor	26.8	-	10.0	7.93	-	10.0	7.00	-	-	0.13	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.007	-	-	-	0.021	0.026	0.041	0.284	327.0	16.0	0.17	-	-
2.	-	-	0.007	-	-	-	0.019	0.029	0.032	0.415	465.0	16.0	0.16	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Keerom**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Hulu S. Tami	28.2	138.0	285.0	7.78	2.20	10.0	6.01	-	-	0.32	5.50	0.022	0.37	-	0.049
2.	Hilir S. Tami	29.8	585.0	194.0	7.40	3.78	15.0	5.68	-	-	0.16	2.40	0.009	2.16	-	0.015

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.005	0.022	-	0.000	0.012	0.047	0.043	0.38	543.0	13.0	0.35	14	7
2.	-	-	0.003	0.001	-	0.000	0.014	0.039	0.024	0.91	1015.0	19.0	0.26	78	67

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Jayapura

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kali Biru	27.0	107.0	14.0	7.61	2.12	5.0	5.08	-	-	0.22	1.30	0.003	2.13	-	0.001
2.	Sungai Damsari	25.3	46.0	13.0	8.19	2.97	10.0	5.14	-	-	0.26	1.70	0.004	1.25	-	0.004

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.012	0.006	-	0.000	0.025	0.012	0.046	0.440	493.0	16.0	0.14	166	147
2.	-	-	0.004	0.010	-	0.000	0.011	0.037	0.012	0.256	287.0	19.0	0.18	9	5

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kota Jayapura**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kai Kamwolker	25.3	96.7	10.0	8.37	2.88	5.0	5.59	-	-	0.55	1.30	0.001	2.26	-	0.001
2.	Hulu S. Anafre	25.5	90.0	15.0	8.11	3.15	10.0	7.86	-	-	0.29	1.10	0.001	2.41	-	0.001

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.008	0.007	-	0.080	0.018	0.024	0.049	0.105	118.0	25.0	0.14	494	58
2.	-	-	0.008	0.008	-	0.000	0.017	0.026	0.035	0.503	563.0	25.0	0.16	233	32

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Pemantauan Tahap II

Hasil pemantauan kualitas air di 14 titik pantau yang tersebar pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Terjadinya pencemaran air pada beberapa titik pantau ada yang disebabkan karena keadaan alami dari fisik air yang terlihat keruh seperti di Hulu Sungai Tami Kabupaten Keerom, dimana nilai parameter Total Suspended Solid (TSS) atau partikel yang tersuspensi dalam badan air mencapai 294 Mg/L dari yang seharusnya 50 Mg/L. Komponen pencemaran air juga dapat berasal dari aktifitas manusia seperti limbah domestic, pertanian dan industry. Contoh pencemar yang diakibatkan oleh aktifitas manusia adalah Fenol. Hasil analisis laboratorium terhadap parameter tersebut menunjukkan 10 titik pantau berada diatas baku mutu yaitu antara 13 µg/L di Hulu S. Tami di Keerom dan tertinggi 36 µg/L di Sungai Baliem Jayawijaya. Parameter logam terlarut seperti tembaga, hasil analisis menunjukkan 11 titik memiliki nilai konsentrasi berada diatas baku mutu yaitu antara 0.024 Mg/L di Kali Kamwolker Jayapura s/d 0.334 Mg/L di Sungai Napua Jayawijaya. nilai tertinggi terdapat di Sungai Baliem di Kabupaten Jayawijaya 0.094 Mg/L dari 0.03 Mg/L dan untuk parameter Mikrobiologi Bakteri Coli Tinja dan Coliform pada seluruh titik pantau masih berada di bawah baku mutu.

Hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Data Hasil Analisis Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Jayawijaya**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Napua	18.3	-	13.0	7.67	3.32	20.0	8.02	-	-	-	-	-	0.29	-	-
2.	Sungai Baliem	18.4	-	21.0	6.76	2.52	15.0	5.98	-	-	-	-	-	0.47	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	Minyak/Lemak	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	<0.001	0.002	-	-	<0.002	0,048	0.095	-	513.0	27.0	-	27	46
2.	-	-	0.001	0.013	-	-	0.004	0.229	0.184	-	163.0	34.0	-	36	39

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Provinsi Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Mimika**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Selamat Datang	-	-	29.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-
2.	Sungai Jayanti	-	-	15.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.006	0.003	-	-	0.024	0.030	0.067	-	116.0	0.37	-	48	188
2.	-	-	0.002	0.001	-	-	0.007	0.042	0.084	-	1082.0	0.39	-	34	166

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Merauke**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Rawa Biru	28.0	-	-	6.40	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hulu S. Maro	28.0	-	-	5.70	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	<0.001	0.005	-	-	0.006	0.052	0.081	-	445.0	4.0	-	14	32
2.	-	-	<0.001	0.001	-	-	0.005	0.104	0.086	-	834.0	13.0	-	59	≥1898

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Biak Numfor**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kali Ruar	-	-	26.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-
2.	Sungai Wafor	-	-	45.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.003	0.009	-	-	0.015	0.052	0.035	-	479.0	58.0	-	390	390
2.	-	-	<0.001	0.003	-	-	0.005	0.062	0.074	-	406.0	51.0	-	188	≥1898

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Keerom**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS		pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L		6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Hulu S. Tami	31.4	-	-		7.36	-	15.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hilir S. Tami	30.7	-	-		7.56	-	20.0	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.0	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.0	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kabupaten Jayapura**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kali Biru	25.0	-	47.0	7.31	-	10.0	5.90	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sungai Damsari	24.6	-	27.0	7.65	-	10.0	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.001	0.003	-	-	0.003	0.062	0.087	-	565.0	-	-	-	-
2.	-	-	0.001	0.002	-	-	0.004	0.056	0.061	-	164.0	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

**Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kota Jayapura**

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	25 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Kai Kamwolker	25.3	-	15.0	7.75	2.26	5.0	6.0	-	-	0.53	0.60	0.001	1.15	-	0.001
2.	Hulu S. Anafre	25.4	-	-	7.16	-	15.0	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	5000 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	-	-	0.005	0.001	-	-	0.016	0.025	0.084	16.0	127.0	1.0	-	-	-
2.	-	-	0.001	0.003	-	-	0.003	0.018	0.023	-	201.0	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2016.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Anggaran kegiatan sebesar Rp.643.550.000,- (Enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 93,94% dan realisasi keuangan 92,67%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp.596.389.100,- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah). Dengan bobot 13,08%.

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua

Hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup RI terkait dengan mutu dokumen, bahwa dokumen yang telah diterbitkan kelayakan lingkungannya oleh Komisi Provinsi dan Kabupaten/Kota 80% tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan.

Mutu dokumen lingkungan hidup ditentukan oleh Tim Penyusun Dokumen AMDAL dan Penilai dokumen AMDAL. Kedua institusi ini harus berkolaborasi yang baik sehingga dihasilkan dokumen yang layak dan bermutu.

Komisi penilai AMDAL Provinsi Papua secara berjenjang dan kontinyu melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota komisi dalam hal ini Tim Teknis dan Sekretariat Komisi. Untuk tahun 2016 peningkatan kapasitas anggota komisi dilakukan di Jayapura, Jogjarkarta (UGM) dan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Cq. Tim Teknis dalam melakukan penilaian dokumen Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL-RPL.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan regulasi sector (perundang-undangan) yang terkait dengan dokumen AMDAL.
3. Meningkatkan kapasitas secretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua adalah Jumlah Komisi Penilai Amdal yang meningkat kapasitasnya dengan target 8 (delapan) orang yaitu 6 (enam) orang Tim Teknis dan 2 (dua) orang Sekretariat.

Outcome Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pembekalan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Cq. Tim Teknis di PSL UGM:

a. Pembekalan dan peningkatan Kapasitas Tim Teknis

Pembekalan dilakukan oleh Tim PSL UGM dalam Hal ini Dr. Eko Sugiarto dan Dr. Endang. Pembekalan menitikberatkan pada penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA) sebagai berikut :

- Teknis panapisan rencana kegiatan.

Penapisan rencana kegiatan memberikan arahan rencana kegiatan termasuk wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL dengan mengacu kepada Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana kegiatan yang wajib AMDAL

Penapisan juga memberikan arahan bahwa dokumen yang wajib AMDAL dilakukan penilaiannya oleh Komisi AMDAL Pusat, Komisi AMDAL Provinsi atau Komisi AMDAL kabupaten/kota.

- Uji administrasi.

Uji administrasi dilakukan sebelum dokumen KA dinilai secara teknis oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL. Uji administrasi dilakukan oleh sekretariat Komisi Penilai AMDAL. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai :

a. Kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi.

b. Ketidaklengkapan administgrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

- Uji Kualitas Dokumen Kerangka Acuan

Penyusunan dokumen Kerangka Acuan lebih menitikberatkan pada Pelingkupan dan Metodologi.

- a. Pelingkupan

- Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, kesesuaian dengan tata ruang
- Deskripsi rona lingkungan hidup awal. Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup secara umum
- Dampak Penting Hipotetik

Dampak Penting Hipotetik, pada bagian ini penyusun dokumen amdal menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik tersebut pada dasarnya diawali melalui proses identifikasi dampak potensial. Esensi dari proses identifikasi dampak potensial ini adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Langkah ini menghasilkan daftar 'dampak potensial'. Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting atau tidak.

Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak Potensial. Evaluasi Dampak Potensial esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.

Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu. Kalau pihak pemrakarsa telah memiliki SOP maka hal ini dijadikan pedoman dalam melakukan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup.

Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)'. Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal diharapkan menyampaikan keluaran berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi DPH. Setelah itu seluruh DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam ANDAL sesuai hasil pelingkupan. Dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannya

dengan dasar argumentasi yang kuat kenapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut

- Batas Wilayah Studi

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan metode telaahan. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan batas wilayah studi.

b. Metode Studi

Pada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

- Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.

Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak yaitu:

- 1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data.
- 2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan,

instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.

- Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan. Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut.
- Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksidampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

2. Kunjungan Lapangan ke Kelompok Tani Tunas Mekar

Kelompok Tani Tunas Mekar terletak di Kampung Ciletuh Desa Ciderum Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor. Kelompok tani ini terdiri dari 200 kelompok.

Kelompok tani Tunas Mekar telah menerapkan pengelolaan sawah/padi dan tanaman palawija yang ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah padi sebagai pupuk organik telah dilakukan dan diterapkan pada Kelompok Tani Tunas Mekar.

3. Pembekalan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembekalan di lakukan di Kantor Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Direktorat Jederal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pemberi materi adalah Erick Teguh, S. Hut. Adapun materinya dalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Audit Lingkungan.
 - b. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Persyaratan lokasi kegiatan (ruang) atau larangan untuk melakukan aktifitas tertentu dalam lokasi tertentu.
 - c. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Baku Mutu Lingkungan (BML, Krateria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL).
 - d. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta pelaksanaan tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Persyaratan perizinan sector.
 - f. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas Lingkungan Hidup termasuk Pemetaannya.
 - g. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penataan Lingkungan Hidup (Pengawasan dan Penegakan Hukum LH).
4. Pembekalan Tim Teknis di Jayapura

Pembekalan Tim Teknis setiap tahun dilakukan dalam bentuk pembinaan, refreshment, dan bedah dokumen. Pembekalan di Tim Teknis yang bertempat di Jayapura di bombing oleh Dr. Eko Sugiarto (pakar AMDAL UGM).

Materi yang dibawakan adalah :

- Uji administrasi yang di fokuskan kepada Sekretaria Komisi AMDAL
- Penilaian dokumen kerangka acuan serta ANDAL dan RKL-RPL dengan berpedoman pada PermenLh nomor 16 tahun 2012. Penilaian ini akan memakai beberapa uji, seprti; uji konsistensi, uji keharusan, uji kedalaman untuk setiap dampak yang diperkeirakan timbul.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.464.300.000,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 94,64% dan realisasi keuangan 94,17%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 437.210.102,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua rupiah). Dengan 9,44%.

1. Pemantauan RKL/RPL dan Rencana Pembangunan Venue PON

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang telah di canangkan pelaksanaannya di Provinsi Papua tinggal 3 tahun lagi, untuk itu Pemerintah Papua harus menyiapkan infrastruktur sesuai dengan pembangunan Venue PON. Dalam pengelolaan infrastruktur venue PON tersebut di 5 (lima) Kabupaten / Kota antara lain :

1. Kabupaten Merauke
2. Kabupaten Mimika
3. Kabupaten Jayapura
4. Kabupaten Biak Numfor
5. Kotamadya Jayapura

Pemerintah Provinsi Papua melalui BPLH Provinsi Papua telah melakukan pemantauan lapangan untuk melihat secara dekat kesiapan Venue PON di 5 (lima) Kabupaten / Kota sejak Mei 2016, dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa sarana prasarana Venue PON telah terbangun, sedang di bangun dan masih dalam tahap penetapan lokasi. Terkait dengan kesiapan Venue PON dimaksud maka rapat koordinasi bersama dengan 5 (lima) kabupaten / kota untuk mendiskusikan beberapa fasilitas venue PON yang dimaksud.

Output Kegiatan

Dari hasil pemantauan lapangan oleh BPLH Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten beserta Instansi terkait di 5 (lima) Kabupaten\Kota yang dicanangkan sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2016 kemudian dilanjutkan Rapat Koordinasi Venue PON tanggal 8 s/d 10 Desember 2016 di Jayapura.

Hasil pemantauan di 5 (lima) Kabupaten / Kota hampir sebagian besar fasilitas Venue PON XX Tahun 2020 sudah di bangun tetapi belum memiliki ijin lingkungan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup yaitu :

- Stadion Kaltapal Kabupaten Merauke
- Stadion Kampung Harapan Kabupaten Jayapura
- Lokasi Ex Hotel Marauw Kabupaten Biak Numfor

Dan venue yang lainnya hanya memiliki UKL-UPL.

Fasilitas venue yang sudah terbangun banyak sudah tidak memenuhi syarat sebagai sarana olah raga sehingga perlu adanya perbaikan terkecuali untuk venue di Kabupaten Mimika.

Khusus untuk cabor paralayang yang rencana di Kabupaten Biak Numfor perlu di pertimbangkan mengingat cuaca dan arah angin sewaktu-waktu bisa berubah arah tidak tergantung pada musim.

Outcome Kegiatan

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPLH Provinsi dan BPLH Kabupaten bersama Instansi terkait (DISPORA, BAPPEDA Kabupaten) secara umum sudah banyak terbangun, namun belum tuntas 100% dan banyak bangunan yang perlu ada perbaikan disana sini agar sesuai standar yang diberlakukan sebagai sarana Olah raga yang memadai.

Kalau dilihat dari segi Ijin lingkungan semua bangunan yang ada belum memiliki ijin lingkungan. Setelah diklarifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Maka ada beberapa Venue yang wajib Amdal seperti Stadion Kaltapal Kabupaten Merauke, Lokasi Ex Hotel Marauw (320 Ha) untuk olah raga renang, selancar, Hockey, Road race Kabupaten Biak Numfor, dan Stadion Kampung Harapan Kabuapten Jayapura, sisanya hanya berupa UKL dan UPL.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat foto-foto kondisi venue yang ada setiap kabupaten / kota sebagai berikut :

a) Kabupaten Mimika

Dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika sangat siap sebagai tuan rumah PON XX sesuai master plane PON 2020, dibuktikan dengan terbangunnya Sport center mimika sejak tahun 2014, Lapangan basket, Lapangan futsal dan Padang golf Rimba papua, Lapangan bulu tangkis, Lapangan volly pantai, dan Kolam renang di Kuala kencana. Sedangkan untuk di cabang olah raga Tinju di Lanud Mimika, semua venue yang ada dibangun oleh PT. Freeport Indonesia. Mengenai dokumen lingkungan belum dipastikan masuk dalam dokumen AMDAL 300K.



Sport Center Mimika

- Atletik dan Tribun
- Wisma Atlit



Kuala Kencana

- Padang Golf Rimba Papua
- Lap. Basket
- Lap. Futsal
- Lap. Bulu Tangkis
- Gedung Squarz
- Lap. Volly Pantai
- Kolam Renang



Lanud Mimika

- Tinju

b) Kabupaten Merauke

Cabang olah raga yang ada di Kabupaten Merauke sesuai master plane antara lain :



Stadion Katapal

- Sepak Bola
- Karate
- Futsal



GOR Hiad Sai Trikora

- Basket
- Taekwondo



Pacuan Kuda Sidomulyo

- Pacuan Kuda
- Ketangkasan Berkuda



Stadion Maro

- Sepak Bola
- Futsal



Sircuit

- Relly Mobil
- Motor Cross

c) Kabupaten Jayapura

Cabang olah raga yang ada di Kabupaten Jayapura sesuai master plane antara lain :



GOR Toware

- Sepak Takraw



Danau Sentani (Khalkote)

- Canoeing
- Rowing
- Traditional Boat Race
- Sky air



Stadion Kampung Harapan

- Sepak Bola
- Anggar
- Sepeda (Track, Road, MTB, BMX)
- Base Ball
- Soft Ball
- Bowling
- Cricket
- Drumb Band
- Kempo
- Menembak
- Tarung Derajat
- Tennis
- Sepatu Roda

d) Kota Jayapura

Cabang olah raga yang ada di Kota Jayapura sesuai master plane antara lain :



Pantai Hamadi

- Layar



GOR Cenderawasih

- Senam



Stadion Mandala

- Sepak Bola



Hotel Aston

- Angkat Besi
- Angkat Berat
- Binaraga



Swiss Bel Hotel

- Bridge
- Catur



Sahid Hotel

- Dansa



GOR Waringin

- Volly (indoor)



Auditorium UNCEN

- Gulat
- Judo
- Futsal



GOR Trikora

- Pencak Silat
- Tenis Meja
- Wushu



Lap. Sepak Bola UNCEN

- Panahan
- Panjat Tebing

e) Kabupaten Biak Numfor

Cabang olah raga yang ada di Kabupaten Biak Numfor sesuai master plane antara lain :



Ibdi (Badan Diklat)

- Sepak Bola
- Road Race



Sumberker

- Paralayang



Ex Hotel Marauw

- Renang
- Selancar
- Hockey
- Road Race



Taman Anggrek

- Lap. Hockey (Indoor & Outdoor)

Khusus untuk cabor Paralayang di Kabupaten Biak Numfor yang rencana start dari Kampung paray dan finish di Bandara Frans Kaisiepo perlu jadi perhatian mengingat cuaca dan arah angin sewaktu-waktu bisa berubah tidak tergantung pada musim. Arah angin pada musim barat (November s/d April) dan sering terjadi arah angin selatan tidak tergantung musim.

Rapat Koordinasi

- 1) Perlu melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait di 5 (lima) kabupaten / kota lokasi venue PON.
- 2) Pemerakarsa kegiatan perlu berkoordinasi dengan instansi BPLH Provinsi Papua terkait ijin lingkungan.
- 3) Pemerintah Provinsi Papua mewajibkan kepada Dunia Usaha berpartisipasi mendukung pembangunan venue PON dan penyelenggaraan PON XX tahun 2020.



Pembukaan Rapat Koordinasi Pemantauan Rencana Pembangunan Venue PON XX di 5 Kabupaten / kota



Presentase hasil pemantauan lapangan Venue PON XX di 5 kabupaten / kota



Perwakilan BLH, DISORDA, Fasilitas Venue PON XX yang BAPEDDA dari 5 kabupaten / kota sudah di bangun



Anggaran kegiatan sebesar Rp.236.700.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 91,55% dan realisasi keuangan 91,43%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 216.414.000,-(dua ratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Dengan bobot 4,81%.

2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Pembangunan yang dilakukan diberbagai sektor selain berdampak positif, juga tidak bisa dihindarkan akan timbulnya dampak negatif. Penurunan kualitas udara ambien akibat peningkatan sumber pencemar udara oleh kegiatan manusia perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran udara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai dengan norma, standard, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melakukan pemantauan kualitas udara ambien yaitu kualitas udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir di wilayah Papua yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Kegiatan pemantauan udara ambien memiliki arti penting untuk mengetahui kualitas udara sebagai kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang kualitas udara yang ada di lingkungan.

Output Kegiatan

Terlaksananya pemantauan Kualitas Udara Ambien yang dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yaitu :

1. Jayapura di Kota Jayapura
2. Sentani di Kabupaten Jayapura
3. Merauke di Kab Merauke
4. Wamena di Kabupaten Jayawijaya
5. Timika di Kabupaten Mimika

Outcome Kegiatan

Dilaksanakannya pengukuran Kualitas Udara Ambien di 15 (lima belas) titik pantau dengan Hasil Analisis Udara Ambien Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Hasil Analisa Udara Ambien Tahun 2016

No	Parameter	Baku Mutu	PLTD Waena	Kampus Yapis Jayapura	Perum. Aspol Deplat Kiri	PLTD Sentani	Sentani City Square	Kantor Bupati Jayapura	PLTD Kelapa Lima	Ruko Sentosa	Stadion Katalpal	PLTD Sinakma	Hotel Ranu Jaya	Kantor Bupati Jayawijaya	PLTD Area Timika	Gedung Emeneme Jaware	GOR Caritas
			KOTA JAYAPURA			KABUPATEN JAYAPURA			KABUPATEN MERAUKE			KABUPATEN JAYAWIJAYA		KABUPATEN MIMIKA			
1	Sulfur dioksida, SO ₂	900	16	14	20	21	18	17	11	14	20	16	16	21	21	24	29
2	Carbon Monoksida, CO	30000	2765	2382	2404	4074	3889	4303	2949	4235	3694	4506	4283	3729	4908	3704	3514
3	Nitrogen Dioksida, NO ₂	400	60	49	52	41	43	39	57	50	48	45	55	60	45	48	54
4	Ozon, O ₃	235	27	23	25	28	32	27	30	23	31	29	30	34	29	33	31
5	Hidrokarbon, HC	160	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53	<6,53
6	Partikulat, TSP	230	27	42	35	78	85	21	26	69	35	16	141	27	72	24	18
7	Timbal, Pb	2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8	Kebisingan rata-rata	70	70,4	66	62,9	70,7	71	65,7	73	70,3	57,9	66,6	71,6	59,9	57,3	63,1	62,3

Keterangan :
 = Nilai Maksimum
 = Nilai Minimum
 = Nilai Diatas Baku Mutu

Dari Hasil Pemantauan Kualitas Ambien dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Jayawijaya, dan Mimika menunjukkan kualitas udara ambien di Provinsi Papua masih sangat bagus dimana semua parameter kualitas udara ambien masih jauh dibawah nilai ambang batas baku mutu kualitas udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.
2. Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada semua lokasi pemantauan masuk dalam rentang 0 – 50 dengan katagori **BAIK**.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 560.100.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 96,39%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 539.893.900,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus rupiah). Dengan bobot 6,82%.

3. Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kegiatan pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang seharusnya tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan hidup di Provinsi Papua, wajib meminimalisasi dampak negatife yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan kelayakan LH maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah melibatkan BLH di Kabupaten Merauke, Keerom, Mimika, Nabire

dan Bappeda Boven Digoel telah mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada Tahun 2016.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi, **verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan**, antara lain; **izin lingkungan, izin usaha dan izin terkait lainnya serta melihat kegiatan lapangan sebagaimana termuat pada dokumen RKL-RPL.**

Setelah melakukan tugas diatas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) atau Tim Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan daerah masing-masing, sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Output Kegiatan

Pengawasan Lingkungan hidup di lakukan pada dunia usaha/kegiatan di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Keerom, Meauke, Nabire, dan Boven Digoel dengan sasaran perusahaan sbb :

1. PT. Tandan Sawita Kabupaten Keerom;
2. PT. Internusa Jaya Sejahtera Kabupaten Merauke;
3. PT. Jati Dharma Indah Kabupaten Nabire.
4. PT. Tunas Timber Lestari Boven Digoel;
5. PT. EISSU Kabupaten Mimika;
6. PT. Freeport Indonesia Kabupaten Mimika

Outcome Kegiatan

Temuan Hasil Pengawasan PT. Tandan Sawita Papua di Kab. Keerom

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
A.	Verifikasi Administrasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Tandan Sawita Papua telah memiliki izin lingkungan perkebunan dan pengelolaan seluas + 18.337,90 Ha di Distrik Arso Timur Kab. Keerom, Provinsi Papua (SK. Bupati Keerom No. 660 Tahun 2011 Tanggal 1 Maret 2011) 2. PT. Tandan Sawita Papua mempunyai profil Perusahaan (Compani Profile) yang memuat : Informasi tentang akta perusahaan, susunan pengurasm susunan pemegang saham, legalitas umum dan legalitas khusus 3. Susunan organisasi (Organization Structure) PT.Tandan Sawita Papus Oil Palm Plantation Organization Structure 2016 terdiri dari: a. RH. Papua; b. AM Papua 1 (Am Agre, Am Agra) c. AM Papua 2 ; Em Rfle; d. JPRO; 4. Dalam Susunan Organisasi PT. Tandan Sawita Papua, Tim BPLH dan BLH Kab. Keerom belum melihat adanya Departemen Lingkungan dalam struktir Organisasi tersebut. 5. PT. Tandan Sawita Papua Belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) belum disampaikan kepada BPLH Provinsi Papua dan BLH Merauke 	
B.	Verifikasi Lapangan	
		Areal Tandan sawita dan Kebun Plasma



Lokasi pondasi
pembangunan pabrik
pengolahan CPO
PT. Tandan Sawi



Klinik PT. Tandan
Sawita Papua serta
masih tercampurnya
Limbah Inpeksius
dengan limbah
domestik (belum ada
pemisahan)





Cangkang buah yang di bakar



Gudang pupuk yang di gabung dengan ruang BBM



Areal HCV/NKT

Temuan Hasil Pengawasan PT. Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
A.	<p>Verifikasi Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Internusa Jaya Sejahtera memiliki izin lingkungan perkebunan dan pabrik kelapa sawit seluas 18.587.05 Ha di Distrik Ulin dan Elikobel sesuai SK. Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 Tanggal 13 November 2014 2. PT. Internusa Jaya Sejahtera mempunyai Profil Perusahaan (Company Profile) yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi tentang akta perusahaan - Susunan Pengurus - Susunan Pemegang Saham - Legalitas Umum - Legalitas Khusus 3. Susunan organisasi (Organization Structure) PT.Tandan Sawita Papua Oil Palm Plantation Organization Structure 2016 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Head Office-Organization Structure; - QSM-Organization Structure - Operation-Organization Structure - Financial-Organization Structure - General-Organization Structure 4. Dalam Susunan Organisasi PT. Internusa Jaya Sejahtera Oil Palm Plantation Organization Structure 2016, Tim BPLH dan BLH Kab. Keerom belum melihat adanya Departemen Lingkungan dalam struktur Organisasi tersebut. 5. PT. Internusa Jaya Sejahtera Belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan 6. Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) belum disampaikan kepada BPLH Provinsi Papua dan BLH Merauke 	
B	<p>Verifikasi Lapangan</p> 	<p>Pembersihan lahan (land Clearing) seluas 3.200 Ha. Siap ditanami</p>
		<p>Pembuatan tempat pesamaan bibit kelapa sawit</p>



Bibit siap tanam 700.000 pohon yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara oleh PT.Socofindo.



Perbengkelan, tempat penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dikelola dengan baik.



Gudang penyimpanan pupuk sementara dalam penyelesaian dan pupuk untuk sementara ini disimpan di 2 (dua) buah container.

	<p>Waduk penyimpanan air masih bersifat temporer, belum permanen dan bersifat sementara.</p>
	
	<p>Program CSR dalam bentuk pembangunan jembatan konstruksi kayu (sementara) dan pemeliharaan jalan secara berkala.</p>

- Kantor di perkebunan tidak representatif, sehingga pengelolaan administrasi dan manajemen lingkungan tidak efektif termasuk manajemen kebun dalam mengelola staf dan pekerja pada perkebunan kelapa sawit di Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan hal ini juga menyulitkan Tim Pengawas dalam memperoleh data dan informasi atau bahan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Menara Pemantau Titik-titik Api dan sumur pantau pencemaran air belum ada

Temuan Hasil Pengawasan PT. Tunas Timber Lestari di Kabupaten Boven Digoel

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
A.	<p>Verifikasi Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen AMDAL kegiatan IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari telah mendapat SK Kelayakan Lingkungan Menteri Kehutanan RI Nomor 94/DJ-VI/AMDAL/1995 Tanggal 12 Mei 1995 2. Luas Areal PT. Tunas Timber Lestari seluas 214,935 Ha 3. Pelaporan RKL – RPL PT. Tunas Timber Lestari periode 11 Juli – Desember 2015 	
B	<p>Verifikasi Lapangan</p> <p>Program CSR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencetakan sawah seluas 8 Ha pada koordinat : S : 06'20"42,5". E : 140'48'54,2". 2. Pembangunan SD Inpres kelas jauh Asiki sebanyak 4 kelas dan penyediaan tenaga pengajar sebanyak 6 (enam) orang yang digaji oleh Pihak Perusahaan. Koordinat S : 06'20"45,4" S : 140'48"58,2". 3. Tenaga kerja lokal telah dilibatkan pada pencetakan sawah. 4. Penanaman pohon karet menurut marga pada areal konsesi perusahaan. 5. Pembayaran kompensasi kayu pada blok tebangan telah dilakukan sejak tahun 1999. 6. Tenaga kerja lepas (masyarakat pribumi/suku Auyu dan Mandobo) yang dipekerja untuk menguliti kayu pada TPK pada KM 37 dan KM 55 sebanyak 18 orang. <p>Kegiatan Lapangan :</p> <p>a. Penebangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penebangan kayu telah mencapai RKT 2016 pada km 57, pada koordinat : ... 2. Sistem penebangan telah mengikuti sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) 3. Telah dilakukan reboisasi (karet, nyatoh, resak) sepanjang ruas jalan angkut kayu sepanjang 57 KM. <p>b. Perbengkelan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terlihat informasi tentang ruang kerja dari setiap unit bengkel. Titik Koordinat : S 06'20,5,7". E : 140'49'07,2" 2. Karyawan tidak menggunakan alat pelindung diri (helm, sepatu, sarung tangan, kacamata, pelindung telinga) selama bekerja. 3. Masih terlihat ceceran oli diatas areal kerja. 4. Belum tersedia wadah untuk menampung sisa karbit yang digunakan untuk pekerjaan las 5. Belum terbangun Tempat penyimpanan sementara oli bekas (limbah B3). 6. Belum tersedia look book (pencatatan) oli bekas pada unit kerja pengantian oli. 7. Belum tersedia papan informasi dan look book pada bengkel mensin dan bubut. 8. Belum ada izin penyimpanan B3 	   

Temuan Hasil Pengawasan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
A	<p>Verifikasi Lapangan</p> 	<p>Verifikasi di lakukan terhadap fasilitas OWS yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah</p> <p>Pengambilan sampel air buangan dari fasilitas OWS yang mewakili dataran rendah dan dan dataran tinggi.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel yang telah diambil tersebut akan di analisa di laboratorium ALS terakreditasi di Jakarta dan Laboratorium lingkungan PT. Freeport Indonesia (TEL) untuk parameter minyak dan lemak. Satu sampel akan di simpan di laboratorium lingkungan PT. Freeport Indonesia (TEL) sebagai sampel arsip untuk dilakukan analisis kemudian apabila ada perbedaan nilai hasil analisis ALS dan TEL 2. Menegluarkan fasilitas OWS-HLUGAPT-01, OWS-HIGRHLT-01,OWS-HLUGBBT-02, OWS-HLUGDMLZ-01, OWS-LLKPI-05 dan OWS-LLKPI-08 dari daftar perijinan karena fasilitas tersebut sudah tidak beroperasi. 3. Menambahkan tiga fasilitas baru yang telah di verifikasi dalam perijinan <ul style="list-style-type: none"> - MP72 Terra Shop (OWS-HLUGBBT-03) pengganti OWS- HLUGBBT-02 - UG-2810 Shop (OWS-HLUG2810-01) - LIP Chakra Jawara (OWS-LLCJ-01) 		

Temuan Hasil Pengawasan PT. EISSU Prima Usaha di Kabupaten Mimika

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
A.	<p>Verifikasi Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Instalasi Penampungan BBM PT. EISSU Prima Usaha SK. Kabag Lingkungan Hidup SETDA Kab. Mimika nomor 01/LH/20016 tanggal 14 Februari 2006 - Tidak menemukan dokumen yang berkaitan dengan keg/usaha dari PT. EISSU Prima Usaha di kantor - Belum melaporkan secara berkala tentang UKL-UPL - Belum memiliki Devisi/Departemen Lingkungan 	

B	<p>Verifikasi Lapangan</p>  	<p>Adanya Kebocoran pada tangki nomor 3 yang berisi premium (tidak diaktifkan)</p>
		

	 	<p>OWS yang belum berfungsi dengan baik</p> <p>Adanya Penambahan 2 unit tangki BBM yang sudah berfungsi untuk avtur (tangki no. 9 & 10)</p>
		

- Tingkat ketaatan dan kepatuhan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ke enam perusahaan yang di pantau ada diantaranya belum menunjukkan perbaikan lingkungan sebagaimana yang telah termuat dalam dokumen AMDAL, RKL dan RPL.
- Bahwa perusahaan yang diawasi belum memiliki ijin-ijin lain sebagai tindak lanjut dari ijin lingkungan.

- Pemerintah Kabupaten Mimika, Merauke, Nabire, Keerom, dan Boven Digoel wajib mengawasi operasional perusahaan yang beroperasi di masing-masing kabupaten.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 452.000.000,- (Empat ratus lima puluh dua juta Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 60,98% dan realisasi keuangan 89,28%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 389.422.600,- (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah). Dengan bobot 9,19%.

4. Kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura

Dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup selama ini, masih dijumpai kendala rendahnya partisipasi stakeholder maupun masyarakat untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menciptakan kota bersih dan teduh disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap permasalahan lingkungan yang ada, rendahnya tingkat kemampuan dan rendahnya komitmen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, disamping pemahaman pelaku pemerintahan terhadap pelestarian lingkungan juga masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari persepsi para pelaku pelestari lingkungan hidup yang sangat bervariasi.

Mengingat pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku dan menjadi media yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, etika, disiplin dan budi pekerti pelaksana Pemerintahan dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, maka disusunlah suatu kebijakan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang Undang No. 32 pada tahun 2009 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pelaksanaan dalam Pengelolaan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Instansi terkait.

Adapun dasar pelaksanaan dari kegiatan dimaksud antara lain : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengolaan Sampah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01 Tahun

2009, tentang Program ADIPURA dan Permendagri No.01 Tahun 2007, tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Output Kegiatan

1. Tersosialisasinya Program ADIPURA di 4 (Empat) Kabupaten;
2. Terimplementasinya Program ADIPURA di 2 (dua) Kabupaten/Kota sehingga memperoleh Tropi tahun 2016 yaitu:
 - a. Kota Jayapura menerima penghargaan berupa Tropi ADIPURA Kirana Tahun 2016;
 - b. Kabupaten Biak Numfor menerima penghargaan berupa Tropi ADIPURA Buana Tahun 2016.
3. Terealisasinya Kota Bersih dan Teduh (ADIPURA) di Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Mimika, Kabupaten Jayapura.

Outcome Kegiatan

Dilaksanakannya kegiatan Pembinaan, pemantauan dan penilaian ADIPURA melalui :

- Pertemuan dengan Institusi Lingkungan dan Instansi terkait;
- serta Observasi lapangan untuk tingkat Provinsi di 8 (delapan) Kabupaten yaitu :

a. Kabupaten Merauke	d.Kabupaten Jayawijaya
b. Kabupaten Mimika	e.Kabupaten Biak Numfor
c. Kabupaten Jayapura	f.Kota Jayapura

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 355.500.000,- (Tiga Ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,74%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 339.723.504,- (Tiga Ratus tiga puluh sembilan). Dengan bobot 7,23%.

5. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH

Dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan, pemerintah Provinsi telah meresmikan UPT laboratorium Lingkungan yang berada dibawah instansi Badan Pengelola Lingkungan Hidup pada bulan Desember 2015. Sedangkan penempatan tenaga pengelola Laboratorium baru dapat dilaksanakan pada Bulan Maret tahun 2016.

Terbatasnya sumber daya manusia dan prasarana yang ada, pada tahun 2016 kegiatan lebih diutamakan pada penyediaan tenaga analis dan melengkapi peralatan yang telah ada. Namun dari jumlah dana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium Badan Pengelola lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tahun 2016 menyiapkan dana untuk keperluan penyiapan tenaga sdm, penyiapan bahan kimia serta sarana prasarana berupa jaringan air dan meja analisis, menara tendon air, Sarana Pengelolaan limbah (IPAL) serta peralatan kebutuhan untuk pengambilan dan pengujian kualitas air dan udara.

Output Kegiatan

1. Dalam Pelaksanaan Penyiapan SDM masih perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan kursus-kursus bagi tenaga analis serta tenaga administrasi lab seperti penyelia dan lain sebagainya yang merupakan syarat untuk mendapatkan akreditasi Laboratorium
2. Penunjukan Laboratorium Lapkesda Provinsi Papua sebagai laboratorium rujukan kiranya dapat di alihkan ke UPT Laboratorium lingkungan dengan telah diresmikannya UPT Laboratorium Lingkungan.
3. Dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium disarankan pelatihan pengoperasian alat juga mencakup sampai tahap uji coba pengambilan dan uji sampel dimasukkan dalam butir kontrak.

4. Dengan Telah Diresmikannya UPT laboratorium Lingkungan kirana dapat disarankan untuk dapat diusulkan kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pendanaan Peningkatan kapasitas Laboratorium berupa rekomendasi pengadaan peralatan Sampling, Laboratorium dan renovasi gedung Lab oleh P3KLL.
5. Pada tahun 2017 diharapkan Laboratorium Lingkungan Provinsi Papua dapat mengikuti uji Profisiensi untuk parameter tersebut diatas.
6. Diharapkan UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Papua pada tahun yang akan datang juga merupakan salah satu UPT yang menghasilkan pendapatan Daerah.

Outcome Kegiatan

1. Penyediaan Tenaga Analisis
2. Pelatihan Tenaga Analisis Laboratorium

Pelatihan ini untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dari tenaga analis laboratorium lingkungan tentang prosedur kerja yang akan dilakukan untuk pengambilan serta analisa parameter lingkungan yang akan diperiksa. Media komunikasi yang baik sangat diperlukan sehingga terjadi kesamaan persepsi mengenai aktifitas lapangan atau laboratorium yang efektif dilakukan dalam kegiatan peningkatan mutu tenaga analis laboratorium lingkungan di sektor UPT. Laboratorium Lingkungan. Lebih rincinya sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman mengenai teknik pengambilan sampel dan pentingnya penanganan sampel dari awal hingga perlakuan analisa dalam laboratorium UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN BPLH.
- Membangun tim kerja yang baik disektor Pemerintahan, Tenaga Lapangan, Masyarakat, dan lainnya.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 5 (lima) orang dari UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Kegiatan ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kapasitas mutu kerja analis laboratorium lingkungan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Oktober 2016, bertempat di Pusarpedal, Serpong tanggerang Adapun kunjungan lapangan tanggal 21 Oktober 2016 di Bina Laboratorium Bandung Selama 1 (satu) hari.

3. Pengadaan Regean (Bahan Kimia)
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium
5. Pembangunan sarana pendukung Laboratorium

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.432.000.000,- (Tiga Ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,72%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 2.320.390.000,- (Tiga Ratus tiga puluh sembilan). Dengan bobot 49,43%.

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1. Kegiatan Konferensi Internasional Tentang Biodiversitas dan Pariwisata untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Orang Papua

Papua merupakan bagian barat pulau besar New Guinea, sebagai pulau terbesar di Indonesia yang terbagi dalam 2 wilayah pemerintahan yakni Provinsi Papua dengan luas 316.553,07 Km² (BPS, 2013) dan Provinsi dengan luas wilayah 97.117 Km² (www.dephut.go.id).

Sebagai pulau terbesar di Indonesia Papua dikaruniai kekayaan alam dan keragaman ekosistem yang luar biasa, yang terkandung didalam hutan, pesisir dan laut, serta mineral di dalam tanah. Kekayaan keanekaragaman hayati Papua merupakan separuh dari keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya flora dan fauna endemik yang hanya terdapat di pulau ini. Papua merupakan habitat bagi 15.000–20.000 jenis tumbuhan (55% endemik), 2000 jenis anggrek , 602 jenis burung (52% endemik), 125 jenis mamalia (58% endemik) , dan 223 jenis reptilia dan ampibia (35% endemik), 25 jenis ikan air tawar dan

1200 jenis ikan laut serta diperkirakan 150.000 jenis serangga (*Ekologi Papua*, 2013).

Kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam pembangunan Papua sehingga tidak terjadisalah langkah dalam proses pembangunan yang merugikan dikemudian hari. Potensi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem Papua merupakan dasar untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Potensi ini perlu disosialisaikan, diperkenalkan dan dipromosikan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan ekowisata guna mempertahankan identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua serta untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterisolasian dan kematian.

Penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat untuk pengembangan potensi-potensi tersebut yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua perlu dipublikasikan agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan lainnya guna penyamaan persepsi dalam implementasi pendekatan pembangunan di Provinsi Papua.

Output Kegiatan

1. Memperkenalkan dan mempromosikan potensi keanekaragaman hayati, ekowisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
2. Mensosialisasikan Konsep dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua berbasis wilayah adat.
3. Memsosialisasikan hasil-hasil Pembangunan 3 (tiga) Tahun Kepemimpinan Gubernur & Wakil Gubernur dan Program GERBANGMAS HASRAT PAPUA

Outcome Kegiatan

1. Tersosialisasikannya potensi-potensi keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif Provinsi Papua yang dapat dilihat secara langsung oleh pengunjung pameran.
2. Sebagai ajang promosi investasi berbasis potensi keanekaragaman hayati dan ekowisata di Provinsi Papua.

3. Untuk memperoleh dukungan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.
4. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya bagi generasi penerus serta anak cucu orang asli Papua tentang Keanekaragaman Hayati Papua untuk tetap terjaga dan melestarikannya di masa mendatang

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.809.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus sembilan juta rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 87,65% dan realisasi keuangan 87,32%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 7.692.032.310,- (Tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Dengan bobot 39,86 %.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi Papua merupakan kegiatan wajib yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 10 huruf h) yang mewajibkan Pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/ kota menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dilakukan sejak Tahun 2002, didasarkan pada surat Menteri Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian

Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Sejak Tahun 2008, buku Laporan Status Lingkungan Hidup di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disebut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD Provinsi) dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.

Output Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan ini, Penyusunan Status Lingkungan Hidup ini, menghasilkan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 2 (dua) buku yaitu (a) Buku II atau Buku Data dan (b) Buku I atau Buku Laporan yang merupakan hasil analisis sebab-sebab akibat dari aktifitas manusia maupun dari perubahan-perubahan alam secara global, berjumlah 100 Buku, yang terdiri dari Buku Data dan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 masing-masing 50 Buku.

Outcome Kegiatan

- Meningkatkan kesadaran dan kefahaman akan kecenderungan dan kondisi lingkungan;
- Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;
- Memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju keberlanjutan;

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 115.821.000,- (Seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 63,59% dan realisasi keuangan 62,73%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp.72.658.000,- (Tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu Rupiah). Dengan bobot 0,52 %.

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota

Pesatnya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL mendorong kesiapan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua untuk lebih cermat dan memiliki independensi dalam memberikan penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hal ini penting untuk dilakukan karena hingga Tahun 2016, di Provinsi Papua hanya memiliki 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA). Untuk itu, beberapa proses penilaian yang seharusnya menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota masih dinilai oleh KPA Provinsi Papua. Mendasari kondisi tersebut, maka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KPA Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk memperkuat KPA yang telah memiliki lisensi.

Output Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilaksanakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke telah dilaksanakan dan pemahaman terhadap implementasi peraturan perundang – undangan di bidang AMDAL semakin meningkat.
2. Hasil pengawasan kinerja KPA Kota Jayapura, KPA Kabupaten Jayapura dan KPA Kabupaten Merauke dengan menggunakan parameter menunjukkan kinerja KPA dari aspek administrasi proses AMDAL dan mutu dokumen hasil penilaian sebagai berikut :

- a. KPA Kabupaten Jayapura memiliki **kinerja baik**
- b. KPA Kota Jayapura memiliki **kinerja cukup baik**
- c. KPA Kabupaten Merauke memiliki **kinerja baik**

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota adalah:

A. KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN JAYAPURA

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Jayapura terbentuk berdasarkan lisensi yang diterbitkan oleh Bupati Jayapura dengan nomor 660/0321/SET, Tanggal 20 Februari 2015. Sebagaimana lingkup pengawasan dan pembinaan ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1. SDM yang dimiliki oleh baik Sekretariat, Tim Teknis dan KPA masih memenuhi persyaratan yang dipenuhi dalam lisensi
2. Tim Teknis KPA memiliki 2 anggota Tim Teknis yang memiliki sertifikat AMDAL Penyusun (AMDAL B) dan 3 anggota Tim teknis memiliki sertifikat AMDAL Penilai (AMDAL C)
3. Anggota tim teknis dan sekretariat KPA mampu untuk memahami terhadap penapisan, sistematika penulisan dokumen AMDAL, penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL – RPL) sesuai dengan peraturan yang dipedomani
4. KPA Kabupaten Jayapura berada di Instansi Badan Lingkungan Hidup setingkat Eselon II;
5. Seluruh sarana Penunjang kegiatan KPA cukup memadai namun untuk ruang sekretariat penataan kurang rapi.

b. Pengawasan

1. Beberapa rekomendasi hasil BINWAS KPA Tahun 2015 telah dilaksanakan;

2. Jumlah dokumen yang telah dinilai oleh KPA Kabupaten Jayapura sampai dengan 2016 saat dilakukan BINWAS sebanyak 14 Dokumen dari usaha dan/atau kegiatan, baik yang telah memiliki izin lingkungan maupun yang masih dalam proses AMDAL. Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain :
 - a. PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - b. PT. Sinar Indah Perkasa (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - c. PT. Rimba Matoa Lestari (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - d. PT. Permata Nusa Mandiri (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - e. PT. Arthon Jaya Energi (Usaha Pertambangan Batu Bara)
 - f. PT. Nusantara Sago Prima (Pemanfaatan Hutan Sagu/Tepung Sagu)
 - g. PT. Delta Rekamandiri (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - h. PT. Wira Antara (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - i. PT. Daya Indah Nusantara (Perkebunan Kelapa Sawit)
 - j. PT. Wira Antara (Perkebunan Kelapa Sawit)
3. *Logbook* masing – masing usaha dan/atau kegiatan tidak terdokumentasikan secara rapi, mulai proses Konsultasi Publik – Penerbitan Izin Lingkungan;
4. Beberapa bukti/lampiran surat menyurat (pengantar dokumen, hasil uji administrasi, surat penyampaian Berita Acara Rapat dan Notulensi), tidak tersip/terdokumentasi;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat tidak ada contoh *draft* Izin Lingkungan;
6. Dokumen Final untuk masing – masing usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan tidak terdokumentasikan sebagai arsip (hilang);

7. Durasi proses AMDAL untuk setiap jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Jayapura ± 12 Bulan;
8. Rapat Mandiri dan/atau verifikasi terhadap dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan tidak dilakukan.
9. Hasil uji mutu dokumen tidak dapat dilakukan secara efektif karena dokumen yang hendak diuji bukan dokumen final yang telah mendapat pengesahan berdasarkan kelayakan dan izin yang diterbitkan.
10. Uji petik terhadap *draft* dokumen AMDAL Rencana Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Wira Antara, ditemukan belum ada bukti formal kesesuaian ruang dengan RTRW Kabupaten Jayapura dan/atau RTRW Provinsi Papua, Peta – Peta yang memenuhi kaidah kartografi.

B. KOMISI PENILAI AMDAL KOTA JAYAPURA

Komisi Penilai AMDAL Kota Jayapura terbentuk berdasarkan lisensi yang diterbitkan oleh Walikota Jayapura dengan nomor 660/189/2012, diterbitkan tanggal 15 Januari 2012 (*Kadaluarsa*). Sebagaimana lingkup pengawasan dan pembinaan adalah mengevaluasi proses administrasi dan mutu dokumen maka dapat ditemukan hal – hal sebagai berikut :

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1. SDM yang dimiliki oleh baik Sekretariat, Tim Teknis dan KPA masih memenuhi persyaratan namun penerbitan lisensi kota belum diperoleh bukti fisiknya;
2. Tim Teknis KPA memiliki 2 anggota Tim Teknis yang memiliki sertifikat AMDAL Penyusun (AMDAL B) dan 3 anggota Tim teknis memiliki sertifikat AMDAL Penilai (AMDAL C);

3. Anggota tim teknis dan sekretariat KPA cukup memahami terhadap penapisan, sistematika penulisan dokumen AMDAL, penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL – RPL) sesuai dengan peraturan yang dipedomani namun terdapat pula beberapa aturan yang belum dilaksanakan sepenuhnya;
4. KPA Kota Jayapura berada di Instansi Badan Lingkungan Hidup setingkat Eselon II;
5. Seluruh sarana Penunjang kegiatan KPA cukup memadai namun untuk ruang sekretariat dan perpustakaan/pengarsipan penataan kurang rapi.

b. Pengawasan

1. Sejak KPA Kota Jayapura memiliki lisensi sudah 8 dokumen AMDAL yang diproses dan diterbitkan izin lingkungan antara lain:
 - Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi Holtekamp sepanjang 9.058,60 meter oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII
 - Rencana Pembangunan Pasar Yotefa oleh Dinas Perindagkop
 - Rencana Pembangunan RS Abepura oleh RSUD Abepura
 - Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan Rollo oleh PT. Karya Gemilang Papua
 - Rencana Budidaya Tanaman Sagu oleh PT. Berlin Krida Jaya
 - Rencana Penambahan Bangunan Hotel Swisbell oleh PT. Jayapura Pasifik Permai
 - Rencana Kegiatan Gedung dan Pelatihan Penerbangan oleh Balai Pererbangan Jayapura
 - Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas dan Infrastruktur Pemukiman

2. Tidak ada *Logbook* untuk tiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang diproses oleh KPA Kota Jayapura;
3. Tidak ada tanda terima dokumen sampel/ccontoh untuk setiap dokumen baik KA maupun ANDAL dan RKL – RPL;
4. Tidak ada surat hasil uji administrasi KA, ANDAL dan RKL – RPL sesuai panduan 01 dan 02 pada PERMENLH 08/2013 tentang Tata laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
5. Tidak ada surat pernyataan lengkap administrasi dari KPA melalui sekretariat kepada Pemrakarsa setelah dokumen diperiksa;
6. Tidak ada surat pengantar BA dan Notulensi Rapat kepada Pemrakarsa.
7. Terhadap mutu dokumen AMDAL (uji konsistensi, keharusan, relevansi dan kedalaman dokumen), Tim BINWAS tidak melakukan uji dimaksud karena tidak tersedianya dokumen Final. Namun demikian, uji petik yang pernah dilakukan pada Tahun 2015 terhadap Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Pasar Youtefa di Kota Jayapura. Hasil uji adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada lampiran peta pola ruang Kota Jayapura dalam KA;
 - Kata pengantar dalam dokumen KA tidak ditandatangani oleh Pemrakarsa ;
 - Uraian pada latar belakang belum memasukan justifikasi atau penjelasan yang menerangkan bahwa lokasi kegiatan secara prinsip dapat dilakukan;
 - Pada dokumen KA tidak konsisten antara Evaluasi DPH dan Metode studi ;
 - Peta – peta yang disajikan belum memenuhi kaidah kartografi dan masih menggunakan denah;

- Konsistensi antara Dampak Penting Hipotetik hasil evaluasi yang ada di KA, ANDAL dan RKL – RPL tidak konsisten.

C. KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN MERAUKE

KPA Kabupaten Merauke telah memiliki lisensi Nomor 660/1553 yang diterbitkan oleh Bupati Merauke pada Tanggal 21 Mei 2014 dan berlaku 3 Tahun hingga 21 Mei 2017 berdasarkan rekomendasi lisensi dari Kepala BPLH Provinsi Papua. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

a. Pembinaan

1. SDM yang dimiliki oleh baik Sekretariat, Tim Teknis dan KPA masih memenuhi persyaratan lisensi yang dimiliki;
2. Tim Teknis KPA memiliki 2 anggota Tim Teknis yang memiliki sertifikat AMDAL Penyusun (AMDAL B) dan 3 anggota Tim teknis memiliki sertifikat AMDAL Penilai (AMDAL C);
3. Anggota tim teknis dan sekretariat KPA mampu memahami penapisan, sistematika penulisan dokumen AMDAL, penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL – RPL) sesuai dengan peraturan yang dipedomani. Pembinaan diarahkan lebih kepada panduan penilaian sesuai PERMENLH 08/2013 (panduan 01 & 02)
4. KPA Kabupaten Merauke berada di Instansi Badan Lingkungan Hidup setingkat Eselon II;
5. Seluruh sarana Penunjang kegiatan KPA cukup memadai namun untuk ruang sekretariat dan perpustakaan/pengarsipan penataan cukup rapi karena memiliki ruangan yang cukup luas dibanding KPA Kota Jayapura dan KPA Kabupaten Jayapura.

b. Pengawasan

1. Jumlah dokumen yang sementara diproses dan telah dibahas oleh KPA Kabupaten Merauke sejumlah 9 dokumen dari 9 jenis usaha dan/atau kegiatan antara lain :

- a. Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Global Papua Abadi;
 - b. Rencana Kegiatan Penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke;
 - c. Rencana Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Wanam – Poletom 420 Km oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII;
 - d. Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus oleh BAPPEDA Kabupaten Merauke;
 - e. Rencana Budidaya Tanaman Pangan Padi oleh PT. Parama Pangan
 - f. Rencana Pembangunan RSUD Tipe B;
 - g. Rencana Pembangunan Bandar Udara Kimaam oleh UBPU Merauke
 - h. Rencana Industri Chip PT. Plasma Nutfah;
 - i. /Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Ulili Agro Lestari
2. Dari 9 dokumen dapat yang diproses oleh KPA
 - a. 2 rencana kegiatan sudah memiliki izin lingkungan;
 - b. 2 rencana kegiatan sudah dibahas sampai rapat Komisi
 - c. 5 rencana kegiatan masih pada tahap konsultasi publik
 3. terdapat jenis rencana kegiatan yang kewenangan penilaiannya berada pada KPA Provinsi tetapi diproses oleh KPA Kabupaten Merauke
 4. *Logbook* untuk setiap jenis kegiatan tidak sepenuhnya dicatat secara rapi oleh Sekretariat KPA.
 5. Uji petik terhadap KA, ANDAL dan RKL – RPL tidak dilakukan saat pembinaan dan pengawasan KPA dilakukan karena tidak tersedianya dokumen AMDAL Final yang rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan.

Hasil Penilaian Kinerja Komisi Penilai AMDAL berlisensi di Provinsi Papua Tahun 2016

	KPA Kota Jayapura	KPA Kab Jayapura	KPA Kab Merauke
Administrasi Proses AMDAL			
Keterlibatan masyarakat	2	2	2
Persyaratan administrasi proses AMDAL	1	1	1
Proses dan prosedur penilaian dokumen AMDAL	1	2	1
Keputusan Kelayakan/ Ketidaklayakan LH dan Izin LH	2	2	2
Mutu Dokumen AMDAL			
Kesesuaian dengan peraturan perundang – undangan	1	2	1
Uji Konsistensi dokumen AMDAL	1	1	1
Uji keharusan dokumem AMDAL	1	1	1
Uji relevansi dokumen AMDAL	1	1	1
Uji Kedalaman dokumen AMDAL	1	1	1
Sumber Daya Manusia			
Ketua Koms AMDAL	2	2	2
Tim Teknis berkualifikasi AMDAL B	2	2	2
Tim Teknis berkualifikasi AMDAL C	2	2	2
Tenaga Ahli	2	2	2
Kelembagaan			
Kelembagaan Instansi LH	2	2	2
Ketersediaan Organisasi LH/LSM	2	2	2
Kerjama dengan Laboratorium LH	2	2	2
Jumlah Total	25	26	25
Rerata	1,5625	1,625	1,5625

Sumber : Data Primer, 2016

Keterangan :

Nilai 1 = tidak lengkap/tidak memenuhi

Nilai 2 = lengkap/memenuhi

Tabel di atas menunjukkan KPA Jayapura memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan KPA Kota Jayapura dan KPA Kabupaten Merauke. Hal ini dipengaruhi lengkapnya/ terpenuhinya parameter proses dan prosedur penilaian dokumen AMDAL oleh KPA Kabupaten Jayapura.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 77,64% dan realisasi keuangan 75,46%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 115.906.300,- (seratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus rupiah). Dengan bobot 10,97%.

2. Kegiatan Forum SKPD Lingkungan Hidup se-Provinsi Papua

Salah satu bentuk kerjasama yang perlu di koordinasikan untuk menjawab permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini maupun ke depan di Provinsi Papua adalah bagaimana meningkatkan fungsi koordinasi dan menggalang serta menggerakkan peran aktif semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya melestarikan fungsi lingkungan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Untuk itu pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah Provinsi Papua, berupaya membangun kerjasama dengan Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota maupun mitra kerja lainnya, agar bersama-sama mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten-Kota setiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua merupakan salah satu sarana yang digiatkan untuk memfasilitasi atau memediasi, koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, sinerginitas program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan antara Intansi Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota serta mitra kerja, sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan lingkungan di Provinsi Papua

Output Kegiatan

Output Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup adalah terlaksananya Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 di Kota Jayapura dari tanggal 4 s/d 6 April 2016 di Hotel Aston – Jayapura dan menghasilkan sejumlah **Rekomendasi** sebagai berikut:

R E K O M E N D A S I
FORUM SKPD LINGKUNGAN HIDUP SE-PROVINSI PAPUA
TAHUN 2016

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam April Tahun Dua Ribu Enam Belas, peserta Forum SKPD Lingkungan Hidup Se-Provinsi Papua, merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Papua, hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan UU Nomor 21 Tahun 2001 OTSUS Papua dan Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Kelembagaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota yang memiliki urusan pilihan dan wajib agar ditingkatkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
2. Sinkronisasi dan senergitas program dan kegiatan bidang lingkungan hidup mendukung Sukses PON XX dan Indonesia Bebas Sampah tahun 2020, agar direalisasikan sebagai **program prioritas** TA. 2016 s/d 2020 melalui Program ADIPURA “**GO ADIPURA 2020**”.
3. Pemerintah Provinsi Papua perlu membangun komitmen dan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mensukseskan PON 2020 Melalui Program ADIPURA yang pembiayaannya bersumber dari APBD, OTSUS dan APBN.
4. BPLH Provinsi Papua segera Menyusun PERGUB tentang Penyelenggaraan ADIPURA berbasis Lima (5) wilayah Adat dengan prioritas pertama lokasi venue PON XX.
5. Presentase dana 4% dari total 80% Dana Otsus yang diberikan kepada Kabupaten/kota agar diperuntukkan juga untuk kegiatan PPLH.
6. Mengingat Pembangunan SARPRAS Venue PON XX ada yang sudah terbangun dan dalam perencanaan, sehingga penyelesaian dokumen Lingkungan Hidup dan Ijin Lingkungan perlu dikordinasikan dengan Bupati dan Walikota lokasi Venue PON XX dan Kementerian LH dan Kehutanan RI.
7. BPLH Provinsi Papua dan BLH Kab/Kota Lokasi Venue PON XX bertanggungjawab menyelesaikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan pada tahun 2016.
8. Pemerintah Provinsi Papua melalui BPLH segera memprakarsai pembangunan bank sampah induk dan Pengelolaan Limbah B3 di 5 (lima) wilayah adat
9. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH mewajibkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyusun RPPLH yang dikordinir oleh instansi Lingkungan Hidup sehingga RPPLH mulai direncanakan dan disusun pada TA. tahun 2016 s/d 2020.
10. Program penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya SDM Aparatur dilakukan melalui diklat teknis atau BIMTEK yang diprogram dan dianggarkan mulai tahun 2016 s/d 2020, bersumber dari APBD, OTSUS dan APBN Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.
11. Pendanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, melalui Pembentukan Kampung Perubahan Iklim (PROKLIM) yang tersebar di 5 (lima) Wilayah

Adat agar diusulkan melalui mekanisme pendanaan program lingkungan hidup secara global (GEF).

12. Dalam rangka Penegakan Hukum segera dibentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota.
13. Forum SKPD Lingkungan Hidup Se-Papua tahun 2017 dilaksanakan di BATAM.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

ditetapkan di : Jayapura
Tanggal : 6 April 2016

KEPALA BADAN,

Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581122 198703 1 001

Yang Merekomendasi :

Dr.Ir. Noak Kapisa, M.Sc	BPLH Provisi Papua
Ir. Ketty Kailola, M.Si	BLH Kota Jayapura
Maria Tanawani, S.Si, M.Kes	BLH Kab.Kep Yapen
Frumensius Obe, S.Sos	BLH Kab. Merauke
Marthen S. Dembong	BLH Kab.Keerom
Drs. Patrisius Yamlai	BLH Kab.Jayapura
Victor M.Sandy,ST.M.Si	BLH Kab.Biak Numfor
Elay Giban, SE, MM	BLH Kab.Yahukimo
Ir. Clemens Rumbiak	BAPEDALDA Sarmi
Jefri Deda	BLH Kab. Mimika
Klemens Danumira, S.Sos	BLH Kab.Nabire
Isak Nawipa, SKM	Bapedalda Kab. Paniai
Nixon Laempasa,SH,MMT	Dinas Kehutanan dan LH Kab. Supiori
Ir. Michael Mantiri, M.Si	Bappeda Kab. Peg. Bintang
Andius Loho	KLH Kab.Yalimo
Timotius Ugipa	BLH Kab. Intan Jaya

Outcome Kegiatan

Outcome dari Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup adalah :

1. Adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
2. Teridentifikasi permasalahan lingkungan hidup di provinsi papua;
3. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan lingkungan hidup secara terpadu;
4. Terjalannya koordinasi lintas wilayah administrasi dan lintas instansi lingkungan hidup;
5. Adanya pemahaman pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara terpadu.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.454.300.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 93.72%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 425.757.300,- (Empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah). Dengan bobot 32,46%.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai alat pengawasan untuk melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan pendidikan dan pelatihan berupa Kursus atau Bimbingan Teknis

Menyadari pentingnya hal dimaksud maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup serta kursus Dasar Penilai Amdal dan Kursus Dasar Pemetaan (GIS).

Output Kegiatan

- a) Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi pengawasan lingkungan hidup;
- b) Meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c) Meningkatkan Pengetahuan tentang Pemetaan melalui Sistem Informasi Geospasial.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya :

- Bimbingan Teknis Pengawas Lingkungan Hidup yang diikuti oleh 16 (enam belas) orang, terdiri dari :
 - BLH Kota Jayapura 7 Orang
 - BLH Kabupaten Yalimo 1 orang
 - BLH Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Orang
 - BLH Kabupaten Keerom 2 Orang
 - KLH Kabupaten Intan Jaya 1 orang
 - BLH Kabupaten Yahukimo 1 orang
 - BPLH Provinsi Papua 3 orang
- Kursus Dasar Penilai AMDAL yang diikuti oleh 1 Orang BPLH Provinsi Papua.
- Kursus Dasar Pemetaan yang diikuti oleh 1 orang dari BPLH Provinsi Papua.

Sehingga secara capaian kinerja terhadap keluaran kegiatan sebesar 53 %.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.329.700.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 56,64% dan realisasi keuangan 56,12%,

sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 185.033.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah). Dengan bobot 23,56%.

4. Kegiatan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib AMDAL

Aktifitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga dampak pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Dan pada pasal 34 diwajibkan memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabel, dan integritas semua pihak terkait agar instrument ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua juga mempunyai peran yang strategis dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Papua. Dengan semakin besarnya minat investor untuk berinvestasi di Papua, tentu akan menimbulkan dampak lingkungan hidup yang besar. Dokumen AMDAL dan UKL-UPL menjadi kegiatan perencanaan yang letaknya dibagian depan investasi di daerah.

Output Kegiatan

Pada tahun 2016, Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua telah menilai/memeriksa kegiatan wajib AMDAL dan UKL UPL sebanyak 28 kegiatan dengan kegiatan yang memperoleh Kelayakan dan Izin Lingkungan sebanyak 12 kegiatan. UKL-UPL 1 Kegiatan. Sedangkan kegiatan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH sebanyak 27 Komisi AMDAL juga memproses Kesepakatan Kerangka Acuan, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan untuk Proses AMDAL. Keputusan yang lain adalah Surat teguran pembuatan dokumen lingkungan hidup, rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan keputusan DELH.

Terlihat bahwa proses AMDAL selama 105 hari (Permen LH Nomor 08 Tahun 2013) yang terbagi menjadi dua tahap (penilaian KA dan penilaian ANDAL dan RKL-RPL) belum dapat diselesaikan oleh pihak pemrakarsa. Hal ini mengingat perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemrakarsa melalui konsultan sering tidak tepat waktu sebagaimana kesepakatan pada rapat komisi tentang waktu perbaikan dokumen selama 14 hari kerja. Kondisi ini telah disikapi oleh ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua untuk dipercepat menjadi 51 hari kerja, namun dalam implementasinya masih terkendala dengan hal-hal teknis dan non teknis.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan rapat komisi adalah ketidak hadiran anggota komisi, hal jika tetap dibiarkan maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas dokumen AMDAL. Untuk itu kedepannya perlu dipertimbangkan representatif kehadiran anggota komisi penilai AMDAL Provinsi Papua sebagai salah satu syarat rapat komisi AMDAL dilaksanakan.

Outcome Kegiatan

Masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas penilai AMDAL di tingkat Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua, untuk memenuhi target penyelesaian dokumen AMDAL lebih cepat dan berkualitas.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 462.050.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,92%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp.461.675.200,- (Empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah). Dengan bobot 33,01%.

VIII. PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

1. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (Pilot Project)

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktifitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Disamping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik

Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Bukan pemerintah atau lembaga lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, study banding dan memperlihatkan contoh-contoh program yang sukses dan lain-lain.

Output Kegiatan

- a. Mampu mengurangi (*reduce*) volume sampah yang di buang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)
- b. Dapat mengkonversi (*reuse & recycle*) sampah menjadi barang yang berguna bagi masyarakat seperti pupuk kompos, pupuk cair dan biogas
- c. Dengan pengelolaan yang profesional konversi diharapkan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan pupuk kompos, pupuk cair dan biogas

Outcome Kegiatan

Dalam kegiatan pengelolaan sampah tahun 2016 ini akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di 3 kabupaten yaitu Mimika, Jayapura dan Biak Numfor sebagai pilot project kegiatan pada tahun 2015 dan kegiatan pembentukan kelompok pengelola sampah di 3 kabupaten yaitu Keerom, Merauke dan Jayawijaya dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut ini:

1. Kabupaten Mimika

Monitoring dan evaluasi alat pengelolaan sampah takakura home methode dan komposter serta tempat sampah 3 R di Kabupaten Mimika pada kader masyarakat di Distrik Mimika Baru. Dari 5 komposter yang gunakan hingga saat ini hanya 3 Komposter yang telah menghasilkan kompos $\pm 2,4 \text{ m}^3$. Sedangkan 2 Komposter rencananya akan di berikan kepada kelompok kader PKK. Dari komposter ini oleh Distrik sudah di lakukan pemanenan hasilnya beberapa kali dan sudah dimanfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman sayuran, buah- buahan dan tanaman hias di lingkungan kantor Distrik Mimika Baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yohana Arwam (ketua kader) hasil panen dengan menggunakan kompos tersebut sangat bermanfaat.

Sedangkan untuk keranjang takakura dari 5 Keranjang takakura, yang di gunakan di kantor distrik ada 2 keranjang takakura tetapi ketika Tim melakukan monitoring dan evaluasi 2

keranjang takakura tersebut tidak ada di kantor Distrik tersebut. Setelah di konfirmasi kepada mantan Kepala Distrik Mimika Baru Ibu Yohana Arwam, di peroleh informasi bahwa kedua keranjang takakura tersebut awalnya termanfaatkan dengan baik bahkan telah dipanen hasil takakura serta telah di pakai sebagai pupuk untuk tanaman sayuran dan tanaman hias di Distrik akan tetapi setelah terjadi pergantian Kepala Distrik, takakura tersebut tidak di manfaatkan/di gunakan oleh distrik dan di biarkan begitu saja sampai takakura tersebut kering, sehingga akhirnya di ambil oleh Ibu Yohana Arwam dan di gunakan di rumahnya. Sedangkan 3 keranjang takakura lainnya rencananya akan di berikan kepada ibu –ibu PKK.

Dari 5 Tempat Sampah 3R, yang ada di Distrik Mimika Baru hanya ada 2 tempat sampah, itupun belum di manfaatkan/belum di gunakan. Hanya di letakan di Tong komposter. Sedangkan 3 Tempat Sampah 3R lainnya rencananya akan di berikan kepada Ibu-Ibu PKK.

Komposter, 3 keranjang takakura dan 3 Tempat Sampah 3R yang akan di berikan kepada Ibu-Ibu PKK rencananya pada bulan Juni akan di serahkan sekaligus dilakukan sosialisasi tentang cara pengolahan sampahnya. Sebagai narasumber/pembicaranya adalah Ibu Yohana Arwam selaku Ketua POKJA PKK Kabupaten Mimika.

2. Kabupaten Jayapura

Monitoring dan evaluasi alat pengelolaan sampah takakura home methode dan komposter serta tempat sampah 3 R di Kabupaten Jayapura pada kader masyarakat di Kampung Doyo Baru RT 02 RW 03. Dari 7 (tujuh) komposter yang telah terpasang hingga saat ini belum menghasilkan kompos. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 02 Bapak Renyaan ada beberapa kendala yang terjadi yaitu keterbatasan bahan untuk mengisi komposter disekitar komplek perumahan dan adanya keberatan beberapa warga perumahan apabila alat komposter yang telah terpasang disekitar rumahnya menjadi tempat umum untuk pembuangan sampah organik sisa-

sisa dapur seperti sayur, nasi, ikan, buah, tomat dan wortel oleh warga tetangga, hal ini yang menjadi kendala pemanfaatan komposter tersebut belum optimal. Namun setelah dilakukan pembinaan oleh tim bahwa bahan organik lain yang dapat dibuang didalam komposter seperti daun- daunan, rumput yang tidak menimbulkan bau masyarakat sangat mendukung.

Sedangkan untuk keranjang takakura dari 7 (tujuh) Keranjang takakura, yang di gunakan oleh ibu-ibu kader masyarakat hanya 2 yang menghasilkan kompos secara maksimal. Beberapa kendala yang terjadi adalah dalam memasukkan bahan berupa sampah organik sisa-sisa dapur seperti sayur, nasi, ikan, buah, tomat, wortel dan umbi-umbian oleh ibu-ibu kader masyarakat tidak dilakukan pemotongan dengan ukuran yang lebih kecil (2cm-5cm), hal ini yang membuat proses pengomposan oleh bakteri menjadi lebih lama karena ukuran bahan terlalu besar. Dalam proses pengomposan oleh bakteri pengurai ukuran bahan sangat mempengaruhi begitu juga dengan suhu berkisar kurang lebih 60°C.

Kendala yang lain adalah dalam melakukan praktek penggunaan alat komposter dan takakura para kader tidak membaca buku pedoman penggunaan komposter aerob dan takakura home methode yang telah dibagikan. Untuk Tempat Sampah 3R telah dipasang dibeberapa tempat seperti pos ronda, gereja dan disekitar kompleks perumahan.

3. Kabupaten Biak Numfor

Monitoring dan evaluasi alat pengelolaan sampah takakura home methode dan komposter serta tempat sampah 3 R di Kabupaten Biak Numfor pada kader masyarakat di Kampung Mandauw Distrik Samofa juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil diskusi dan kunjungan lapangan ditemukan fakta bahwa bantuan tempat Sampah Komposter sebanyak 7 (tujuh) unit yang terpasang 2 (dua) unit sementara 5 (lima) unit belum dipasang; 7 (tujuh) unit tempat Sampah Takakura sama sekali belum difungsikan; tempat sampah 3R sebanyak 7

(tujuh) unit yang terpasang 3 (tiga) unit, sementara 4 (empat) sedang dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh kader.

Menurut masyarakat Kampung Mandouw, BLH Kabupaten Biak Numfor secara bersamaan membuat program pengelolaan sampah yang lain. Kondisi eksisting saat ini BLH Kabupaten Biak Numfor masuk dengan Program Bank Sampah dan mendaur ulang sampah. Dimana BLH Kabupaten Biak Numfor mendatangkan instruktur dari Malang Jawa Timur. Hal inilah yang membuat konsentrasi masyarakat menjadi terpecah sehingga bantuan pengelola sampah yang diberikan dengan baik oleh BPLH Provinsi Papua belum dapat dimanfaatkan

4. Kabupaten Jayawijaya

Metode yang dilakukan dengan sosialisasi, diskusi dan praktek lapangan serta pemasangan alat pengelolaan sampah (takakura home method, komposter dan praktek mesin pencacah sampah) serta penyerahan bantuan alat pengelola sampah dan tempat sampah 3 R. Di Kabupaten Jayawijaya kegiatan di fokuskan pada kader masyarakat Sekolah Dasar Negeri 1 dan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kabupaten Jayawijaya.

5. Kabupaten Merauke

Metode yang dilakukan dengan sosialisasi, diskusi dan praktek lapangan serta pemasangan alat pengelolaan sampah (takakura home method, komposter dan praktek mesin pencacah sampah) serta penyerahan bantuan alat pengelola sampah dan tempat sampah 3 R. Di Kabupaten Merauke kegiatan di fokuskan pada kader masyarakat di Kampung Marga Mulia Kabupaten Merauke.

6. Kabupaten Keerom

Metode yang dilakukan dengan sosialisasi, diskusi dan praktek dilapangan serta pemasangan alat pengelolaan sampah (takakura home method, komposter dan praktek mesin pencacah sampah) serta penyerahan bantuan alat pengelola sampah dan tempat sampah 3 R. Di Kabupaten Keerom kegiatan di fokuskan pada kader masyarakat di Kampung Arso II Kabupaten Keerom.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 450.400.000,- (Empat ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 99,52% dan realisasi keuangan 96,27%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp.433.613.700,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah). Dengan bobot 2,04 %.

BAB IV MASALAH DAN PEMECAHAN

A. MASALAH

Persoalan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua pada umumnya menyangkut masalah berkembangnya perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk dan pola hidup masyarakat yang membutuhkan sumber daya yang semakin meningkat.

Kondisi ini perlu segera didukung dengan adanya penguatan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang sejalan dengan perkembangan persoalan lingkungan yang dihadapi. Namun demikian perlu juga ada penguatan dan pengawasan oleh masyarakat yang dimulai dari perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pasal 43 bahwa” *Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan Hak - hak Masyarakat Adat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Hukum yang berlaku*”. Untuk itu peranserta masyarakat adat dan semua pihak menjadi kekuatan bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya melalui program dan atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam menjawab permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua tahun 2016, masih banyak persoalan lingkungan yang belum dijangkau untuk ditangani secara cepat dan tepat, mengingat :

1. Wilayah Papua yang sangat luas dan telah dimekarkan menjadi 29 wilayah administrasi (kabupaten/kota) dan belum semuanya memiliki instansi lingkungan hidup;
2. Belum terbentuk organisasi lingkungan hidup di semua Kabupaten di Provinsi Papua dengan kapasitas eselon II dan belum didukung dengan SDM Aparatur yang kompeten di bidang lingkungan hidup.

3. Terbatasnya anggaran pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di Provinsi Papua dan kabupaten/kota.
4. Sarana prasarana belum tersedia dan memadai dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
5. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua yang belum terencana secara komprehensif dan terintegrasi serta masih menjadi urusan yang terbatas hanya pada SKPD Lingkungan Hidup.

B. PEMECAHAN.

Menjawab permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Provinsi Papua telah dilaksanakan program dan atau kegiatan di tahun 2016 sebagai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Forum SKPD Lingkungan Hidup se Provinsi Papua yang mendorong adanya kerjasama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan atau kegiatan di bidang Lingkungan Hidup.
2. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara Ambien yang menginformasikan bahwa di Provinsi Papua masih memiliki Kualitas Air Sungai dan Udara dibawah ambang batas baku yang berlaku, namun perlu dilakukan secara kontinyu guna mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Papua secara keseluruhan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengurusan izin lingkungan yang wajib diselesaikan oleh sector yang membidangi usaha kegiatan termasuk pihak swasta yang berinvestasi di Provinsi Papua dengan patuh pada perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan yang menunjukkan bahwa belum terdapat pelanggaran hukum pidana lingkungan di Provinsi Papua.

5. Perlu dibentuk Organisasi Lingkungan Hidup di semua Kabupaten/Kota dengan kapasitas eselon II dan diperkuat dengan SDM Aparatur yang berkompeten dan pada tahun 2016 sudah ada bertambah lagi organisasi yang terbentuk di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Tolikara, sehingga jumlah instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua sebanyak 24 (dua puluh empat).
6. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua yang telah dilaksanakan melalui ICBE 2016, dengan rekomendasi yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kerja tahun 2017 dan seterusnya pada masing-masing SKPD maupun mitra lainnya.

BAB V
PROGRAM KERJA TAHUN 2017

Program kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2017 pada dasarnya melanjutkan program pengelolaan lingkungan hidup tahun sebelumnya. Adapun kegiatan dari masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.600.000,-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	228.292.000,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.675.000,-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.012.000,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000,-
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1.427.800.000,-
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	118.550.000,-
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	225.800.000,-
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.675.000,-
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	99.500.000,-
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium	125.007.000,-
6	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	352.690.000,-
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	50.320.000,-
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	306.900.000,-

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.671.000,-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	18.213.000,-
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	34.171.000,-
4	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	42.706.000,-
5	Penunjang Sub TP2K Badan Pengelola Lingkungan Hidup	101.128.000,-
VI. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1	Pengawasan Lingkungan Hidup	116.250.000,-
2	Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH	890.048.000,-
3	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	230.700.000,-
4	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Ambien	193.259.000,-
VII. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		
1	Penyebaran Informasi Lingkungan Hidup	155.000.000,-
2	Pekan Lingkungan Hidup Papua	76.934.000,-
VIII. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan dikawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan		
1	Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua dalam ekowisata di Provinsi Papua	199.850.000,-
2	Penyelamatan Danau di Papua	203.510.000,-
IX. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim		
1	Identifikasi Gas Rumah Kaca	204.822.000,-
2	Pengelolaan Sampah di Kab/kota (Pilot/Project)	314.552.000,-
3	Program Kampug Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	191.095.000,-
X. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH		
1	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib AMDAL	344.000.000,-
2	Penyusunan Produk Hukum	313.100.000,-
3	Kampanye Go Adipura PON XX di 5 Wilayah Adat	504.720.000,-
XI. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	272.250.000,-
Jumlah		8.000.000.000,-